

## ANALISIS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESERTA PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL SKEMA IPHPS DI HUTAN LINDUNG GUNUNG RAKUTAK, KPH BANDUNG SELATAN, PERUM PERHUTANI DIVRE JAWA BARAT DAN BANTEN

*(Socio-Economic Analysis of Community Participants on Social Forestry Permits Scheme in Mount Rakutak Protected Forest, KPH Bandung Selatan, Perum Perhutani Divre West Java and Banten)*

PUJO<sup>1</sup>✉, MULYANINGRUM<sup>1</sup>, TRISNA NURHAYATI<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Rekayasa Kehutanan, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

✉Penulis Korespondensi: Email [pujo@sith.itb.ac.id](mailto:pujo@sith.itb.ac.id); [pujo@sith.itb.ac.id](mailto:pujo@sith.itb.ac.id)

Diterima: 15 Mei 2023 | Disetujui: 30 Agustus 2023

**Abstrak.** Selama beberapa dekade, pengelolaan hutan belum mampu mengatasi persoalan-persoalan terkait kerusakan hutan dan kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi peserta program perhutanan sosial dengan skema Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di kawasan Hutan Lindung Gunung Rakutak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner dan wawancara terhadap responden terpilih. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh karakteristik sosial ekonomi peserta IPHPS di Kawasan Hutan Lindung Gunung Rakutak dari aspek pendapatan termasuk kategori rendah, yaitu Rp 24.714.529/tahun. Pendapatan tersebut 36,47% lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bandung tahun 2021. Sebagian besar kontribusi pendapatan IPHPS didominasi pada persentase 0-20% dengan nilai Rp 0–2.500.000/tahun. Meskipun kontribusi pendapatan dari program IPHPS masih minim, namun tetap memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar hutan dilihat dari hasil analisis B/C rasio yang menunjukkan nilai lebih dari 1. Hasil analisis indeks Gini, Skema IPHPS belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan, namun masyarakat menyatakan cukup mendapatkan kesejahteraan dengan adanya program IPHPS.

**Kata kunci:** Perhutanan sosial, pendapatan, ketimpangan pendapatan

**Abstract.** For decades, forest management has not been able to overcome problems related to forest destruction and poverty for the people living in and around the forest. The purpose of this study was to determine the socio-economic characteristics of participants in the social forestry program with the Social Forestry Permits (SFP) scheme in the Mount Rakutak Protected Forest Area. The research method used is a survey method using questionnaires and interviews with selected respondents. Data were analyzed by descriptive qualitative and descriptive quantitative. Based on the research results, it was obtained that the socio-economic characteristics of SFP participants in the Mount Rakutak

*Protected Forest Area from the income aspect were included in the low category, namely IDR 24,714,529/year. This income is 36.47% lower than the Regency Minimum Wage (UMK) for Bandung Regency in 2021. Most of the SFP income contribution is dominated by the percentage of 0-20% with a value of IDR 0–2,500,000/year. Even though the income contribution from SFP program is still low, it still has a positive impact on local communities around the forest, seen from the results of the B/C ratio analysis which shows a value of more than 1. The results of the Gini index analysis show that SFP scheme has not been fully able to overcome the problem of income inequality but the community stated that it was enough to get welfare with the SFP program.*

**Keywords:** Social forestry, income, income inequality

## PENDAHULUAN

Persoalan mendesak yang dihadapi di sektor kehutanan antara lain meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola dengan baik dan merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan (Ekawati *et al.*, 2020). Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program Perhutanan Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan dan social ekonomi masyarakat (Pujo *et al.*, 2018) khususnya di kawasan hutan yang bersinggungan dengan masyarakat (Ekawati *et al.*, 2020; Teitelbaum S., 2014).

Selama beberapa dekade, pengelolaan hutan ini belum mampu mengatasi persoalan-persoalan di atas (Hutomo *et al.*, 2018; Nurbaiti *et al.*, 2022) dan belum mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari (Laksemi *et al.*, 2019). Merespons hal tersebut, pada tahun 2016, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Pemerintah Indonesia 2016). Terkait dengan pengelolaan hutan di Pulau Jawa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No.39 tahun 2017 mengenai

Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani (Pemerintah Indonesia 2017a). Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) diterbitkan kepada masyarakat. Program ini dilakukan untuk menggeser program sebelumnya yang dikembangkan oleh Perum Perhutani yaitu Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang selama ini belum dianggap berhasil meningkatkan partisipasi dan pendapatan masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Hutan Desa (LMDH) (Ramadhan dan Amalia 2021).

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK SK.4616/MENLHK/PKPS/PSL.0/7/2017, ditetapkannya izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) seluas ±1.888 ha pada kawasan hutan lindung di wilayah kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Gunung Rakutak, KPH Bandung Selatan kepada kelompok Tani Mulya Tani (Pemerintah Indonesia 2017b). Implementasi program ini harus dapat mengadaptasi kondisi biofisik, sosial, ekonomi, budaya serta politik lokal (Yeny *et al.*, 2016; Pemerintah Indonesia 2017a; Ekawati *et al.*, 2020). Praktek perhutanan sosial harus dijalankan dengan memperhatikan tiga prinsip utama dalam perhutanan sosial yaitu hak (*right*),

mata pencaharian (*livelihood*) dan konservasi (*conservation*) (Ekawati *et al.*, 2020).

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, program dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian persoalan aspek sosial ekonomi diantaranya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, menyelesaikan konflik tenurial, meningkatkan ketahanan pangan. Disamping itu, implementasi program tersebut sekaligus dapat menyelesaikan persoalan lingkungan seperti mitigasi iklim serta mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Ekawati *et al.*, 2020).

Setelah beberapa tahun berjalan, implementasi program PS dengan skema baru tersebut perlu dikaji secara mendalam keberjalanannya. Pada akhirnya, aspek sosial ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang mengindikasikan keberhasilan implementasi program PS (Muthmainnah dkk., 2022; Sabar dkk., 2022). Untuk mengetahui keberhasilan implementasi program perhutanan sosial dengan skema baru yaitu IPHPS, penelitian tentang karakteristik sosial ekonomi peserta program perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani ini perlu dilakukan.

## METODE PENELITIAN

### Waktu Dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2022 di kawasan IPHPS Kawasan Hutan Lindung Gunung Rakutak Wilayah Perum Perhutani Divre III Jawa Barat, yang secara administratif terletak di tujuh desa dan dua kecamatan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

### Metode Pengambilan Data

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan metode survei dan wawancara terstruktur maupun wawancara mendalam (*in-depth interview*)

dengan responden terpilih dan juga dengan pendamping IPHPS di Kawasan Hutan Lindung Gunung Rakutak.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa data/variabel dari karakter sosial ekonomi masyarakat diperoleh dari responden terpilih, antara lain pendapatan, distribusi pendapatan, data kelatakan usaha tani, kesejahteraan dan persepsi masyarakat terhadap program IPHPS. Data sekunder diperoleh dari studi literatur terkait dengan data lokasi IPHPS, peraturan terkait IPHPS dan Upah Minimum Kabupaten Bandung tahun 2021. Demikian juga variabel untuk persepsi masyarakat. Responden dipilih secara sengaja (*purposive sampling*), yaitu peserta IPHPS Hutan Lindung Gunung Rakutak yang berada di seluruh desa. Besar sampel responden ditentukan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1} \quad (1)$$

Keterangan:

n = Jumlah sampe

N = Jumlah populasi

d = Derajat presisi/*margin of error* (10%)

Pada penelitian ini digunakan derajat presisi atau *margin of error* (d) yang ditetapkan sebesar 10%. Diketahui terdapat 774 peserta program dengan skema IPHPS di Kawasan Hutan Lindung Gunung Rakutak, maka diperoleh jumlah sampel (n) dalam penelitian ini sebesar 104 responden.

### Analisis Data

Beberapa analisis dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Kontribusi pendapatan perhutanan sosial

Besaran kontribusi PS dihitung dengan besaran kontribusi pendapatan dari perhutanan sosial terhadap pendapatan total dari anggota perhutanan sosial (Fauzi *et al.*, 2019).

$$\text{kontribusi pendapatan PS} = \frac{\text{pendapatan PS}}{\text{pendapatan total}} \times 100\% \quad (2)$$

2. Distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan masyarakat dari anggota perhutanan sosial dapat digambarkan dengan kurva Lorenz (Fauzi *et al.*, 2019) dan perhitungan indeks gini. Berikut perhitungan indeks gini:

$$\text{Indeks gini} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i (\sum Y_i + \sum Y_i - 1)}{\sum Y_i} \quad (3)$$

Keterangan:

- Fi : Frekuensi penduduk dalam kelas pendapatan ke-*I*  $Y_i$
- Yi : Frekuensi kumulatif dari total pendapatan kelas pendapatan ke-*i*
- Yi-1 : Frekuensi kumulatif dari total pendapatan kelas pendapatan ke (*i-1*)

Tabel 1. Kriteria distribusi tingkat pendapatan

Indeks Gini	Kriteria
< 0,20	Ketimpangan sangat rendah
0,20-0,35	Ketimpangan rendah
0,36-0,50	Ketimpangan sedang
0,51-0,79	Ketimpangan tinggi
>0,8	Ketimpangan sangat tinggi

3. Analisis kelayakan usahatani

Analisis kelayakan usahatani dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan PS dengan skema IPHPS di Kawasan Hutan Lindung Gunung Rakutak layak diusahakan. Penilaian ini melalui beberapa hal, diantaranya sebagai berikut.

*Net Present Value* (NVP) merupakan *present aliran* kas masuk dikurangi dengan *present value* aliran kas keluar. Jika nilai NPV lebih besar dari nol maka usahatani tersebut layak dikembangkan (Pasaribu *et al.*, 2016).

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{Bt - Ct}{(i+1)^t} \quad (4)$$

Keterangan:

B1, B2...Bn = Arus penerimaan mulai tahun ke *I* sampai dengan tahun ke *n*

C1, C2...Cn = Arus pengeluaran mulai tahun ke *I* sampai tahun ke *n*

*I* = Tingkat *discount rate*

*Internal Rate of Return* (IRR) merupakan *discount rate* yang membuat besarnya NPV proyek sama dengan nol atau dapat membuat B/C rasio menjadi satu. Jika nilai IRR usahatani lebih besar dari suku bunga yang berlaku maka usahatani tersebut layak dilaksanakan. Nilai *discount rate* yang digunakan berdasarkan pada tingkat suku bunga dengan nilai NPV positif dan negatif (Pasaribu *et al.*, 2016).

$$IRR = i_0 + (i_1 - i_0) \frac{NPV_0}{(NPV_0 - NPV_1)} \quad (5)$$

Keterangan:

$i_0$  = Tingkat suku bunga yang berlaku di pasar modal sosial

$i_1$  = Tingkat suku bunga perbandingan

NPV<sub>0</sub> = NPC pada  $i_0$

NPV<sub>1</sub> = NPC pada  $i_1$

B/C rasio merupakan perbandingan antara nilai pemasukan dengan pengeluaran. Apabila nilainya lebih dari satu, maka usahatani layak dilakukan (Pasaribu *et al.*, 2016).

$$B/C \text{ Rasio} = \frac{\sum_{t=1}^n NB_1(+)}{\sum_{t=1}^n NB_1(-)} \quad (6)$$

Keterangan:

NB<sub>1</sub> (+) = Net benefit yang telah di discount positif

NB<sub>1</sub> (-) = Net benefit yang telah di discount negative

*t* = tahun ke-*I*

4. Kesejahteraan subjektif dan persepsi penggarap terhadap hutan

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelsakan hasil penilaian kesejahteraan subjektif dan persepsi penggarap terhadap IPHPS di Kawasan Hutang Lindung Gunung Rakutak dengan menggunakan teknik skoring skala Likert dengan skor 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (cukup setuju); 4 (setuju); dan 5 (sangat setuju).

Kesejahteraan subjektif diukur dengan 5 (lima) pertanyaan terkait: lahan PS sebagai sumber pendapatan alternatif; hasil menggarap lahan PS sudah cukup membantu kebutuhan sehari-hari; hasil menggarap lahan PS sudah cukup membantu kebutuhan pendidikan; hasil menggarap lahan PS sudah cukup membantu pemenuhan kebutuhan kesehatan; menggarap di lahan PS saat ini sudah sesuai harapan. Penilaian dengan skor 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (cukup setuju); 4 (setuju); dan 5 (sangat setuju).

Persepsi responden terhadap IPHPS dinilai dengan beberapa pertanyaan, yaitu: pengetahuan tentang IPHPS yang tertera pada surat keputusan; pengetahuan terkait status areal IPHPS sebagai hutan lindung; pengetahuan

tentang hutan lindung; pengetahuan penggunaan pupuk dan obat kimia yang dapat mengurangi kualitas tanah; pengetahuan IPHPS harus memenuhi kelola hutan, kelola usaha dan kelola kelembagaan. Penilaian dengan skor 1 (sangat rendah); 2 (rendah); 3 (cukup baik); 4 (baik); dan 5 (sangat baik).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Kawasan Hutan Lindung Gunung Rakutak disahkan pada tahun 2017 dan kini terdapat 31 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang tersebar di tujuh desa. Jumlah responden yang diperoleh pada penelitian ini yaitu 104 responden.

Tabel 2. Persebaran responden

Kecamatan	Desa	Jumlah Responden
Ibun	Ibun	21
	Dukuh	21
	Neglasari	13
	Sukarame	26
	Mandalahaji	6
Pacet	Nagrak	6
	Cikawao	11
Jumlah Responden		104

Jumlah responden di atas mewakili jumlah populasi peserta IPHPS pada masing-masing desa lokasi studi.

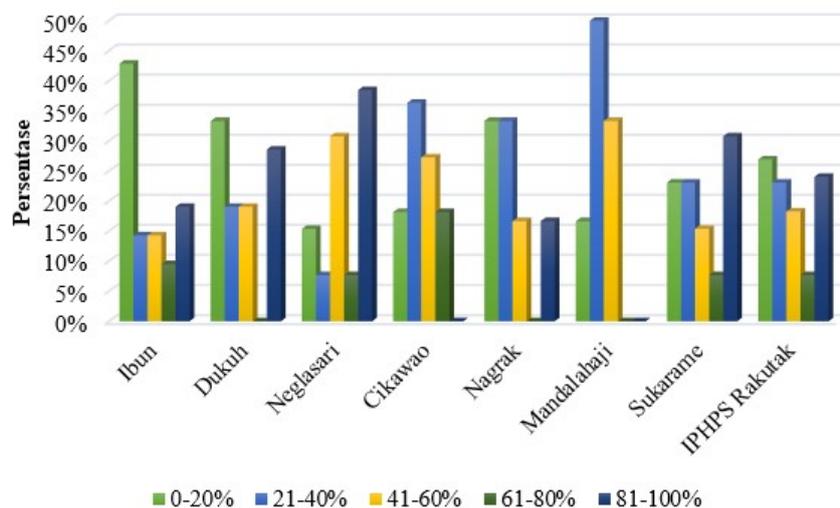
### Kontribusi Pendapatan PS

Pendapatan total rata-rata peserta IPHPS per tahun sebesar Rp. 24.714.529. Nilai tertinggi berada di Desa Cikawao yaitu sebesar Rp. 40.104.545 dan terendah di Desa Dukuh sebesar Rp15.139.762. Pendapatan total rata-rata peserta IPHPS ini memiliki nilai lebih rendah 36,47% dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandung yang tercatat sebesar Rp. 38.903.156,04 per tahun berdasarkan Keputusan

Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.774-Yanbangos/2020 tentang upah minimum kabupaten/kota di daerah provinsi Jawa Barat tahun 2021 (Pemerintah Indonesia 2021).

Sebanyak 16,35% atau 17 orang peserta IPHPS yang memiliki pendapatan total per tahun melebihi UMK Kabupaten Bandung. Adapun, 83,65% atau 87 orang memiliki pendapatan total per tahun masih kurang dari UMK Kabupaten Bandung. Adapun pendapatan total yang sudah mencapai UMK Kabupaten Bandung tertinggi berada Desa Mandalahaji

yaitu 50% dari responden dan terendah di Desa Sukarame yaitu 4% dari responden.



Gambar 1. Kontribusi pendapatan PS

Berdasarkan Gambar 1 diperoleh bahwa kontribusi PS dibagi menjadi lima kelas, di Desa Ibum dan Dukuh kontribusi pendapatan PS didominasi pada kelas 0-20%, Desa Cikawao dan Mandalahaji didominasi pada rentang pendapatan antara 21-40%, Desa Neglasari dan Sukarame didominasi pada rentang 80-100% dan Desa Nagrak didominasi pada rentang 0-20% dan 21-40%. Adapun secara keseluruhan kontribusi pendapatan PS pada peserta IPHPS didominasi pada rentang 0-20% dengan besar pendapatan PS berkisar Rp 0-2.500.000 per tahun. Nilai ini diperoleh karena beberapa

penggarap baru memulai menggarap lahan sehingga belum pernah panen, misalnya tanaman kopi dan alpukat yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa dipanen.

Sumber pendapatan peserta IPHPS terdiri dari pendapatan PS dan pendapatan *non-PS*. Pendapatan PS merupakan pendapatan berupa selisih dari hasil penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lahan perhutanan sosial yang digarap. Adapun pendapatan *non-PS* merupakan pendapatan yang berasal bukan dari lahan garapan peserta IPHPS.

Tabel 3. Rata-rata pendapatan per tahun *non-PS*

Sumber pendapatan	Rata-rata pendapatan per tahun (Rp)	Persentase (%)
Berdagang	38.512.500	7,69
Penjahit	23.840.000	2,88
Gaji bulanan	13.271.429	6,73
Peternakan	9.850.000	7,69
Lahan <i>non-PS</i>	17.232.258	29,81
Serabutan	8.004.706	50

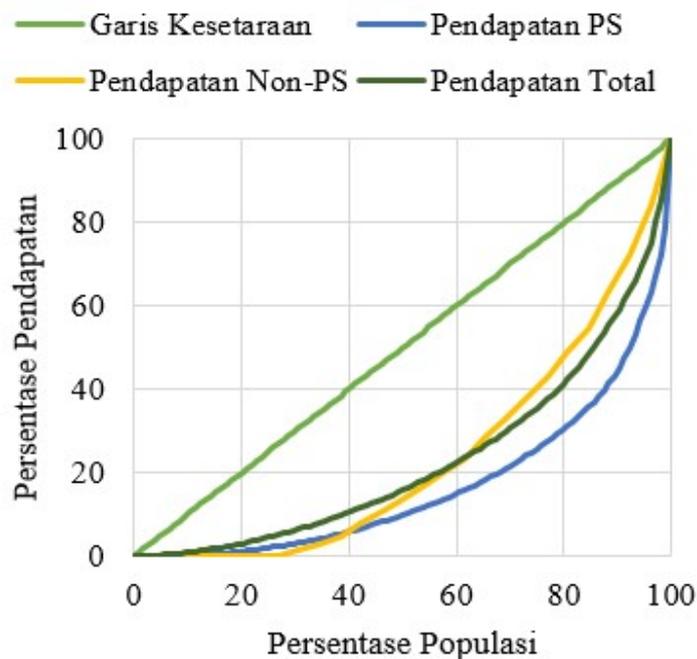
Berdasarkan Tabel 3 diketahui rata-rata pendapatan non-PS terbesar dari berdagang yaitu usaha warung/toko yang menjual kebutuhan rumah tangga. Selain itu, terdapat peserta IPHPS yang juga mengambil jamur kuping yang diperoleh dari pepohonan di hutan atau lahan carik kemudian menjualnya ke pasar dengan harga jual Rp 15.000/kg. Adapun rata-rata pendapatan non-PS terendah yaitu pekerjaan penjahit, hal ini dikarenakan menjahit membutuhkan modal dan keahlian. Para penjahit umumnya menjadikan pekerjaan menggarap lahan sebagai sampingan. Pendapatan dari gaji bulanan diantaranya berupa penjaga sekolah, karyawan pabrik konveksi, badan pemusyawaratan desa (BPD) dan pensiunan. Adapun sumber pendapatan lainnya yaitu peternakan berupa ternak sapi dan/kambing, beberapa responden diketahui sumber

pendapatan utamanya berasal dari hasil peternakan.

Pendapatan lainnya dari lahan non-PS berasal dari lahan pribadi, lahan sewa dan lahan carik desa. Secara umum pendapatan non-PS didominasi dari kegiatan serabutan (buruh tidak tetap) dengan persentase 50% dari peserta IPHPS karena pekerjaan ini tidak membutuhkan modal serta tidak memerlukan keahlian khusus. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penggarap yang rendah sehingga pilihan pekerjaan menjadi terbatas (Dewi *et al.*, 2018). Adapun jenis pekerjaan dari serabutan bermacam-macam seperti buruh tani dan buruh bangunan.

### Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan diukur untuk mengetahui informasi terkait pemerataan pendapatan atau ketimpangan pendapatan yang terjadi pada peserta IPHPS di lokasi studi.



Gambar 2. Kurva Lorenz peserta IPHPS

Pada Kurva Lorenz dapat terlihat bagaimana kondisi ketimpangan dari tiap pendapatan, semakin menjauhi garis pemerataan maka ketimpangan semakin bertambah. Dari Gambar 2 diketahui garis pendapatan PS yang paling jauh dari garis pemerataan, dapat diketahui ketimpangan tertinggi pada pendapatan peserta IPHPS.

Tabel 4. Indeks gini pendapatan peserta IPHPS

Desa	Indeks Gini	Kriteria
Ibun	0,62	Ketimpangan tinggi
Dukuh	0,55	Ketimpangan tinggi
Neglasari	0,62	Ketimpangan tinggi
Cikawao	0,46	Ketimpangan sedang
Nagrak	0,66	Ketimpangan tinggi
Mandalahaji	0,51	Ketimpangan tinggi
Sukarame	0,71	Ketimpangan tinggi
IPHPS	0,66	Ketimpangan tinggi

Berdasarkan Tabel 4 diketahui ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan perhutanan sosial (PS) didominasi pada kriteria ketimpangan tinggi kecuali Desa Cikawao dengan ketimpangan sedang.

Tabel 5. Indeks gini pendapatan non-PS

Desa	Indeks Gini	Kriteria
Ibun	0,63	Ketimpangan tinggi
Dukuh	0,66	Ketimpangan tinggi
Neglasari	0,74	Ketimpangan tinggi
Cikawao	0,57	Ketimpangan tinggi
Nagrak	0,46	Ketimpangan sedang
Mandalahaji	0,34	Ketimpangan rendah
Sukarame	0,53	Ketimpangan tinggi
IPHPS	0,63	Ketimpangan tinggi

Berdasarkan Tabel 5 diketahui ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan non-PS didominasi pada kriteria ketimpangan tinggi kecuali Desa Nagrak dengan ketimpangan sedang dan Desa Mandalahaji dengan tingkat ketimpangan rendah.

Tabel 6. Indeks Gini pendapatan total

Desa	Indeks Gini	Kriteria
Ibun	0,49	Ketimpangan sedang
Dukuh	0,54	Ketimpangan tinggi
Neglasari	0,58	Ketimpangan tinggi
Cikawao	0,49	Ketimpangan sedang
Nagrak	0,37	Ketimpangan sedang
Mandalahaji	0,29	Ketimpangan rendah
Sukarame	0,50	Ketimpangan sedang
IPHPS	0,54	Ketimpangan tinggi

Berdasarkan Tabel 6 diketahui ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan total didominasi pada kriteria ketimpangan tinggi kecuali Desa Ibun dan Cikawao dengan ketimpangan sedang serta Desa Mandalahaji dengan kategori ketimpangan rendah. Secara keseluruhan distribusi pendapatan masih termasuk ke dalam kriteria ketimpangan tinggi dengan indeks gini pendapatan total sebesar 0,54. Jika hanya komponen pendapatan berasal dari lahan hutan atau kegiatan IPHPS, maka indeks gini termasuk ketimpangan tinggi dengan nilai 0,66. Dan sebaliknya jika hanya komponen pendapatan yang dari non-PS saja, nilai indeks gini yang dihasilkan memiliki selisih 0,03 dengan jenis pendapatan PS yaitu 0,63.

Berdasarkan hasil analisis data ini menunjukkan bahwa pendapatan *non-PS* berkontribusi mengurangi ketimpangan pendapatan peserta IPHPS yaitu dengan berkurangnya nilai indeks gini sebesar 0,09. Hal ini menggambarkan bahwa skema IPHPS sebagai program perhutanan sosial baru ini belum mampu mengatasi permasalahan distribusi pendapatan pada masyarakat peserta perhutanan sosial pada saat tanaman *agroforestry* kopi dan alpukat belum

menghasilkan. Mengingat status areal IPHPS sebagai hutan lindung, penganekaragaman sumber mata pencaharian masyarakat hendaknya perlu diupayakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

**Analisis Kelayakan Usahatani**

Analisis kelayakan usaha tani dilakukan terhadap pola *agroforestry* yang dikembangkan di lokasi studi. Terdapat enam komoditas yang umum ditanam pada lahan peserta IPHPS yaitu kopi, alpukat, bawang merah, kol, tomat, kacang merah (Tabel 7).

Tabel 7. Nilai NPV, B/C rasio dan IRR tiap komoditi

Komoditas	B/C Rasio	NPV	IRR
Kopi	1,31	Rp5.67 0.472	4,30%
Alpukat	1,68	Rp6.58 2.810	5,86%
Bawang merah	1,46	Rp75.6 60.000	-
Kol	1,42	Rp1.18 0.000	-
Tomat	1,43	Rp9.05 0.000	-
Kacang merah	1,25	Rp480. 000	-

Kopi merupakan komoditas utama yang ditanam pada lahan IPHPS kecuali di Desa Cikawao. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai NPV tanaman kopi sebesar Rp. 5.670.472. Hal ini menunjukkan pada tingkat suku bunga 3,5% nilai NPV masih menunjukkan nilai positif, sehingga dapat diketahui usaha tani kopi tersebut layak dikembangkan. Adapun nilai B/C rasio terhadap komoditas kopi sebesar 1,31, hal ini menunjukkan setiap pengeluaran satu rupiah akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,31 yang berarti usaha tani bersifat cukup menguntungkan. Nilai IRR dari usaha tani kopi

sebesar 4,3%, hal ini berarti usaha tani kopi masih dapat mengembalikan pinjaman hingga suku bunga 4,3%. Alpukat merupakan jenis tanaman MPTS yang juga ditanam pada lahan IPHPS. Nilai NPV tanaman alpukat dari hasil perhitungan input dan output sebesar Rp. 6.582.810. Hal ini menunjukkan pada tingkat suku bunga 3,5% nilai NPV masih menunjukkan nilai positif, yang berarti layak dikembangkan.

Nilai B/C rasio komoditas kopi sebesar 1,68. Hal ini menunjukkan setiap pengeluaran satu rupiah akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,68 yang berarti usaha tani bersifat cukup menguntungkan. Nilai IRR dari usaha tani kopi sebesar 5,86%, hal ini berarti usaha tani kopi masih dapat mengembalikan pinjaman hingga suku bunga 5,86%.

Beberapa tanaman sayur-sayuran masih ditanam di areal IPHPS sebagai tanaman pengisi saat kopi sebagai tanaman utama berusia < 3 tahun, antara lain bawang merah, kol, tomat dan kacang merah. Tanaman sayuran yang umumnya ditanam di Desa Cikawao yaitu bawang merah. Berdasarkan aturan yang berlaku, sebenarnya penanaman tanaman sayur-sayuran ini tidak diizinkan setelah diberikannya IPHPS (Pemerintah Indonesia 2016; Pemerintah Indonesia 2017a; Pemerintah Indonesia 2017b). Namun, para penggarap beralasan bahwa penanaman tanaman sayuran tetap dilakukan karena tanaman kopi masih berusia muda selain itu panen kopi atau jenis MPTS lainnya baru bisa dipanen beberapa tahun. Pilihan tetap menanam sayuran karena sayur-sayuran hasilnya dapat diperoleh lebih cepat dan dapat dipanen per musim.

Alasan lainnya yaitu pada saat kopi ditanam telah mati karena penggunaan benih tidak unggul yang diambil dari benih pungut (anakan) dari tanaman kopi di daerah lain. Pada saat pertama kali kopi dipanen harga kopi yang

diterima sangat rendah yaitu Rp2000/kg. Belum adanya mitra yang menampung kopi dan kurangnya informasi mengenai harga pasar kopi menyebabkan minat masyarakat Desa Cikawao terhadap tanaman kopi rendah, namun saat ini beberapa petani sudah mulai menanam kopi kembali.

Hasil analisis kelayakan terhadap pola tanaman agroforestri yang memadukan tanaman kehutanan dengan tanaman perkebunan kopi dan alpukat layak untuk dikembangkan. Jenis potensial unggulan yang sangat layak dalam pengelolaan IPHPS di Kawasan Hutan Lindung Gunung Rakutak, selain buahnya yang diambil, tajuk dan tegakannya akan sangat membantu tutupan luasan areal kawasan (hutan lindung) disektor kehutanan dengan sistem agroforestrinya.

Meskipun tanaman sayuran juga layak, namun karena areal IPHPS dengan status hutan lindung, penggarap lahan hendaknya mengalihkan ke jenis tanaman lain secara bertahap untuk menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

### Kesejahteraan Subjektif

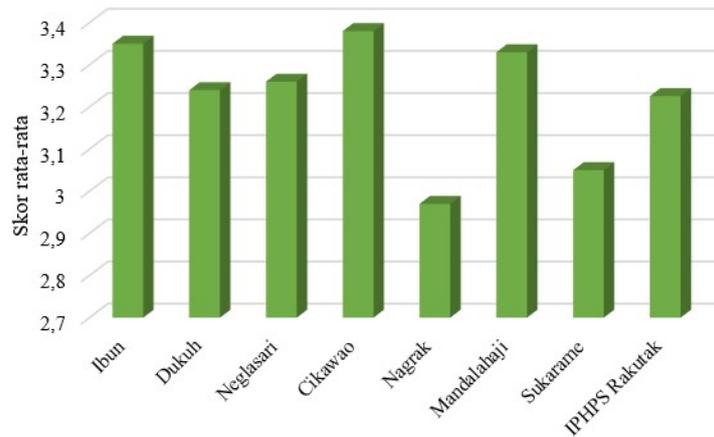
Kesejahteraan subjektif mengacu pada penilaian individu tentang kehidupannya sehubungan dengan kepuasan hidup dan kebahagiaan (Indrahadi *et al.*, 2020). Penilaian kesejahteraan subjektif dilakukan pada peserta program IPHPS untuk mengetahui apakah kegiatan IPHPS sudah membantu memenuhi kepuasan hidup. Berikut disajikan pertanyaan menilai kesejahteraan subjektif pada tabel 8.

Tabel 8. Penilaian kesejahteraan subjektif

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban					Rata-rata Skor	Kesimpulan
		1	2	3	4	5		
1	Lahan IPHPS sebagai sumber pendapatan alternatif	1	6	21	65	12	3,81	Setuju
2	Hasil menggarap lahan IPHPS sudah cukup membantu kebutuhan sehari-hari	7	4	21	61	12	3,67	Setuju
3	Hasil menggarap lahan IPHPS sudah cukup membantu kebutuhan pendidikan	1	56	31	16	1	2,64	Cukup setuju dan Tidak setuju
4	Hasil menggarap lahan IPHPS sudah cukup membantu pemenuhan kebutuhan kesehatan	2	76	23	3	1	2,31	Cukup setuju dan Tidak Setuju
5	Menggarap di lahan IPHPS saat ini sudah sesuai harapan	0	39	45	19	2	2,88	Cukup setuju dan Tidak Setuju
	Rata-rata						3,06	Cukup

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan sebagian besar responden menyatakan IPHPS hadir sebagai sumber pendapatan alternatif dan telah membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pernyataan cukup setuju untuk memenuhi kebutuhan terkait pendidikan dan kesehatan.

Berkaitan dengan apakah IPHPS sudah sesuai dengan harapan, pada umumnya responden menyatakan cukup dan dan tidak setuju. Program IPHPS saat ini belum memenuhi harapan untuk kebutuhan ekonomi.



Gambar 3. Skor rata-rata kesejahteraan subjektif

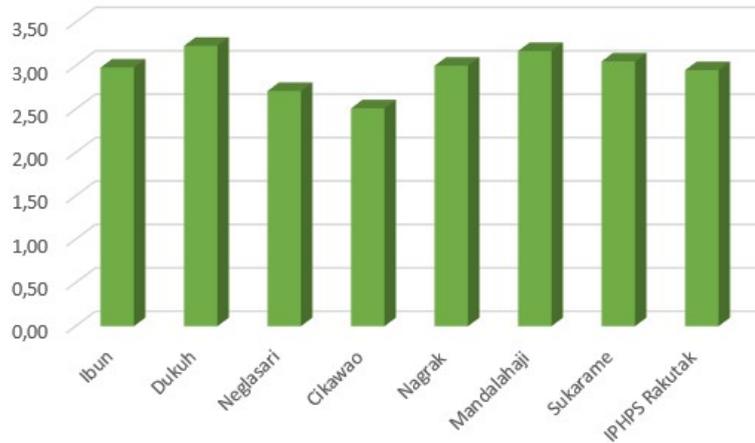
Berdasarkan Tabel 8 dan Gambar 3, nilai skor rata-rata penilaian kesejahteraan subjektif sebesar 3,06 atau cukup setuju. Hal ini menunjukkan program IPHPS cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi peserta. Meskipun 83,65% peserta IPHPS memiliki pendapatan total kurang dari UMK Kabupaten Bandung namun rata-rata responden menilai cukup memiliki kepuasan hidup.

**Persepsi Pengarap Terhadap IPHPS Dan Hutan Lindung Gunung Rakutak**

Persepsi diketahui sebagai proses menyangkut masuknya informasi ke dalam otak manusia, hal-hal yang mendasari persepsi masyarakat akan sesuatu didasari oleh pengetahuan, norma dan lingkungan (Masria *et al.*, 2015). Berikut disajikan persepsi peserta IPHPS terhadap program IPHPS di areal Hutan Lindung Gunung Rakutak (Tabel 9).

Tabel 9. Persepsi responden terhadap program IPHPS

Pertanyaan	Alternatif Jawaban					Rata-rata Skor	Kesimpulan
	1	2	3	4	5		
Pengetahuan tentang IPHPS yang tertera pada SK IPHPS	1	85	8	8	3	2,33	Rendah
Pengetahuan status areal IPHPS Rakutak termasuk hutan lindung	79	9	9	3	5	1,55	Sangat rendah
Pengetahuan tentang hutan lindung	0	30	69	6	0	2,80	Cukup baik
Pengetahuan penggunaan pupuk dan obat kimia dapat mengurangi kualitas tanah	0	5	82	15	3	3,18	Cukup baik
Pengetahuan IPHPS harus memenuhi kelola hutan, kelola usaha dan kelola kelembagaan	0	0	94	5	6	3,19	Cukup baik
Rata-rata						2,61	Cukup baik



Gambar 4. Skor rata-rata persepsi masyarakat terhadap Program IPHPS dan Hutan Lindung Gunung Rakutak

Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 4, secara umum persepsi masyarakat terhadap program IPHPS dan hutan lindung Gunung Rakutak cukup baik. Namun, ada beberapa pertanyaan terkait pengetahuan tentang program IPHPS dan status areal sebagai hutan lindung pada umumnya persepsi responden masih rendah dan sangat rendah. Jika dilihat per desa dapat diketahui Desa Cikawao memiliki persepsi terhadap program IPHPS yang rendah. Hal ini sesuai dengan hasil observasi pada umumnya masyarakat Desa Cikawao masih menanam tanaman bawang yang cenderung dikelola secara intensif sebagai tanaman utama di lahan peserta IPHPS. Pengelolaan lahan secara intensif ini dapat menurunkan fungsi lindung pada areal IPHPS. Selain itu masih terdapat perambahan lahan hutan yaitu lahan cagar alam dan tingkat penebangan liar di sekitar areal IPHPS yang dikelola oleh masyarakat Desa Cikawao. Hal ini menunjukkan kecenderungan masyarakat di desa tersebut belum sepenuhnya memiliki kepedulian dan memahami pentingnya kelestarian hutan.

Beberapa faktor yang mendasari persepsi diantaranya tingkat pendidikan, mata

pencaharian dan tingkat pendapatan (Masria *et al.*, 2015). Berdasarkan data, tingkat pendidikan didominasi pada tingkat sekolah dasar (SD) (64 orang), SMP (16 orang), tidak tamat sekolah (14 orang) dan perguruan tinggi-S1 (1 orang). Alternatif mata pencaharian yang terbatas dan rendahnya pendapatan masyarakat diduga mempengaruhi tingkat kelestarian hutan dan perilaku yang cenderung konsumtif dan eksploitatif terhadap sumberdaya alam di lokasi studi.

### KESIMPULAN

Karakteristik ekonomi peserta IPHPS termasuk ke dalam kategori berpendapatan rendah yaitu masih di bawah UMK dengan nilai kontribusi pendapatan IPHPS berada pada kategori 0-20%. Skema IPHPS belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat peserta program perhutanan sosial. Tingkat kesejahteraan subjektif cukup puas meskipun pendapatan masyarakat umumnya di bawah UMK setempat. Secara umum, karakteristik sosial peserta IPHPS ditandai dengan tingkat persepsi terhadap hutan yang

cukup baik namun secara parsial masih terdapat persepsi masyarakat per desa yang masih menunjukkan persepsi yang rendah, yaitu di Desa Cikawao. Rendahnya tingkat pendidikan, mata pencaharian dan tingkat pendapatan masyarakat merupakan faktor penyebab rendahnya persepsi masyarakat terhadap kelestarian hutan di lokasi studi. Model perhutanan sosial dengan skema IPHPS secara umum belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat di lokasi studi mengingat skema ini belum lama berjalan, tetapi berdasarkan analisis usaha tani memiliki kelayakan untuk dikembangkan dimasa depan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, I.N., Awang, S.A., Andayani, W., dan Suryanto, P. (2018). Karakteristik petani dan kontribusi hutan kemasyarakatan (HKM) terhadap pendapatan petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 12(1): 86-98. <https://doi.org/10.22146/jik.34123>.
- Ekawati, S., Suharti, S., dan Anwar S. (2020). *Bersama membangun perhutanan sosial*. Penerbit PT Penerbit IPB Press.
- Fauzi, D., Chandra, A., Khatimah, H.F., dan Wicaksono, S.A. (2019). *Pengembangan kerangka evaluasi program perhutanan sosial di kawasan hutan lindung: Studi kasus hutan kemasyarakatan (HKM) dan hutan nagari (HN)*. Working Paper. WRI Indonesia. Jakarta.
- Hutomo, P., Sofhani T.F., Gunawan B., dan Syamsudin T.S. (2018). Collaborative Behavior Network on Management of Mount Geulis Protected Forest at Sumedang Regency, West Java Province, Indonesia. *Journal of Sustainability Science and Management*, 13(2): 85-102.
- Indrahadi, D., Muhammad, H., dan Ilham, M. (2020). Faktor sosial penentu kesejahteraan subjektif: Bukti dari Indonesia. *Jurnal Socius*, 7(2): 111-120. DOI: <https://doi.org/10.24036/scs.v7i2.220>.
- Laksemi, N.P.S.T., Sulistyawati, E., dan Mulyaningrum. (2019). Perhutanan sosial berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi kasus di Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2): 150-163.
- Masria, M., Golar, G., dan Ihsan, M. (2015). Persepsi dan sikap masyarakat lokal terhadap hutan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuhan Kabupaten Donggala. *Warta Rimba*, 3(2): 57-64.
- Muthmainnah, Hasanuddim, Sribianti, I., Abdullah, A.A., dan Ramadhan, M.N. (2022). Kontribusi hutan kemasyarakatan (HKM) terhadap pendapatan kelompok tani hutan (KTH) di Desa Gunung Silanu Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, 8(1): 79-86. DOI: <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasiasia.Vol8.Iss1.292>.
- Nurbaiti, S., Utami, S.B., dan Kudus, I. (2022). Kapasitas perum perhutani KPH Bandung Selatan dalam mengelola sumber daya hutan (Studi di Hulu Citarum, Kec. Kertasari, Kab. Bandung, Jawa Barat). *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 13(2): 354-361.
- Pasaribu, M.C., Prasmatiwi, F.E., dan Murniati, K. (2016). Analisis kelayakan finansial usaha tani kakao di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis*, 4(4): 367-375. DOI: <http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v4i4.1518>.
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial*. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. (2017a). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani*. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2017b). *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.4616/KEMENLHK-PSKL/PKPS/PS;.0/9/2017 tentang Perubahan Keputusan Menteri LHK No.SK.3868/KEMENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 Tanggal 11 Juli 2017 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Mulya Tani seluas 1888 (Seribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan) Hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Kerja Perum Perhutani*. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021*. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bandung.
- Ramadhan, R., and Amalia, R.N. (2021). Analisis narasi/diskursus terhadap kebijakan perhutanan sosial di wilayah kerja perhutani. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutan*, 16(1): 1–13. DOI: <https://doi.org/10.31849/forestra.v16i1.5416>.
- Sabar, A., Dassir, M., dan Nurita, S.E. (2022). Modal sosial masyarakat pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) Buhung Lali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, 8(1): 94-101. DOI: <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasiasia.Vol8.Iss1.294>.
- Teitelbaum, S. (2014). Criteria and indicators for the assessment of community forestry outcomes: A comparative analysis from Canada. *J. Environ. Manage*, 132: 257–267. doi: 10.1016/j.jenvman.2013.11.013.
- Yeny I., Yuniati, D., dan Khotimah, H. (2016). Kearifan lokal dan praktik pengelolaan hutan bambu pada masyarakat Bali. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 13(1): 63–72. DOI: [10.20886/jpsek.2016.13.1.63-72](https://doi.org/10.20886/jpsek.2016.13.1.63-72).